



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4310);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 80).
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 32)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021.
- KESATU : Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD;
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi pedoman bagi DPRD Kabupaten Luwu Timur dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021;
- KETIGA : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan DPRD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 26 November 2020

KETUA DPRD,

IRAMIRAN SYAM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021

**DAFTAR RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021**

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10
1	Peraturan Daerah	Pemilihan Kepala Desa	Pengaturan mengenai pemilihan kepala desa secara serentak dan antar waktu	√	-	Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017	√	-	1. Sekretariat Daerah 2. Inspektorat 3. Disdukcapil 4. BKPSDM 5. Satuan Pol-PP & Damkar 6. Kesbangpol	Triwulan I	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
2	Peraturan Daerah	Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019	-	√	-	-	√	-	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Puskesmas	Triwulan I	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Kesehatan
3	Peraturan Daerah	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur	Pengaturan mengenai bentuk Badan Hukum PDAM Kab. Luwu Timur	√	-	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	√	-	1. BPKD 2. Bapelitbangda 3. Satuan Pol-PP & Damkar	Triwulan I	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

4	Peraturan Daerah	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021-2026	Pengaturan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026	√	-	Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	√	-	Semua SKPD	Triwulan I	Perangkat Daerah Pemrakarsa: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda)
5	Peraturan Daerah	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Luwu Timur TA. 2020	-	√	-	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011	√	-	Semua SKPD	Triwulan I	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
6	Peraturan Daerah	Perangkat Desa	Pengaturan mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	√	-	Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	√	-	1. Sekretariat Daerah 2. Satuan Pol-PP & Damkar	Triwulan II	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)

7	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Perubahan Struktur dan besarnya tarif retribusi yang akan ditetapkan	-	√	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	√	1. Dinas Pertanian 2. Dinas Kelautan Perikanan, dan Pangan 3. Satuan Pol-PP & Damkar	Triwulan II	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
8	Peraturan Daerah	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Perubahan retribusi pengendalian menara telekomunikasi	-	√	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	√	1. BPKD 2. Satuan Pol-PP & Damkar	Triwulan II	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
9	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur 2011-2031	Perubahan acuan normatif disesuaikan dengan Perundang-undangan terbaru, perubahan peruntukan ruang dan penegasan pengaturan ruang secara menyeluruh baik ruang darat, ruang udara,, dan ruang dalam bumi	-	√	1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota	-	√	1. DPKPP 2. Dinas PU & PR 3. DPM & PTSP 4. DLH 5. Satuan Pol-PP & Damkar 6. DPRD	Triwulan II	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelbangda)
10	Peraturan Daerah	Badan Permusyawaratan Desa	Pengaturan mengenai Tupoksi dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa	√	-	Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa	-	√	1. Sekretariat Daerah 2. Disdukcapil 3. Satuan Pol-PP & Damkar	Triwulan III	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
11	Peraturan Daerah	Kepemudaan	-	√	-		√	-	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Triwulan III	Pemrakarsa : DPRD Luwu Timur

12	Peraturan Daerah	Penyesuaian Kecamatan Kalaena dan Kecamatan Angkona	Desa Taripa dan Desa Mantadulu Kecamatan Angkona pindah ke Kecamatan Kalaena	√	-	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan	√	Pending	1. DPRD 2. Disdukcapil 3. Satuan Pol-PP & Damkar 4. Camat Angkona 5. Camat Kalaena	Triwulan III	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Luwu Timur
13	Peraturan Daerah	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Luwu Timur TA. 2021	-	√	-	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011	-	√	Semua SKPD	Triwulan III	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
14	Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Luwu Timur TA. 2022	-	√	-	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011	√	-	Semua SKPD	Triwulan IV	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
15	Peraturan Daerah	Naskah Hari Jadi Luwu Timur	-				√	-		Lanjutan	Pemrakarsa : DPRD Luwu Timur
16	Peraturan Daerah	Etika Pemerintahan	-				√			Lanjutan	Pemrakarsa : DPRD Luwu Timur
17	Peraturan Daerah	Kepariwisata	-				√		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Lanjutan	Pemrakarsa : DPRD Luwu Timur

18	Peraturan Daerah	Perlindungan Perempuan terhadap Kekerasan	-				√			Lanjutan	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19	Peraturan Daerah	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya				√			Lanjutan	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

KETUA DPRD,

DAMRAN SYAM